

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 1 Januari 2010 Indonesia telah menandatangani kesepakatan AFTA (*Asian Free Trade Area*) yang mengharuskan para perusahaan dan pengusaha mempersiapkan segala kemungkinan dalam menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai perbaikan kuantitas dan kualitas dari perusahaan untuk dapat bersaing secara wajar dan sehat dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing.

BUMN memiliki peran dan wewenang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara yang diharapkan akan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam, pengelolaannya oleh Negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh Negara kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya.

Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi Indonesia. Disamping itu, dengan persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin dihadapi BUMN tidak hanya berasal dari faktor eksternal tapi juga dari faktor internal BUMN. Salah satu usaha untuk menekan permasalahan yang muncul dari internal akan membantu pihak manajemen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang Undang Pemerintah Nomor. 19 Tahun. 2003

Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan.
2. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian Indonesia, namun dalam kenyataannya masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam BUMN, utamanya dari segi tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*, faktanya banyak BUMN yang belum mengimplementasikan Audit Internal dan *Good Corporate Governance* dengan baik dan di lakukan secara berkesinambungan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan yang dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktifitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Menurut Hery (2018:83) hubungan yang harmonis antara pemilik dana (*principal*) dengan pengguna atau pengelola dana (*management agent*) yang berlandaskan kepercayaan yang tumbuh dari adanya praktik GCG akan menjamin kemudahan akses dana, menunjang investasi dan kegiatan bagi perusahaan.

Setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat di peroleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

1. GCG secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien.
2. GCG dapat membantu perusahaan dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum, dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Dengan kata lain *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan.

Dengan demikian agar GCG dapat tercipta maka harus ada keterlibatan dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal maupun eksternal perusahaan). Pihak internal perusahaan secara sadar harus menerima budaya GCG yang sudah ditetapkan menjadi *best practice* oleh dunia internasional sebagai budaya positif yang harus segera dirancang dan diimplementasikan.

Pihak eksternal secara sadar dan serius harus segera menjabarkan konsep GCG pada berbagai perangkat peraturan dan penegakannya serta mempromosikan dan mendorong percepatan penerapan GCG. Penerapan GCG diyakini akan mendorong penggunaan sumberdaya dan alokasi dana kepada perusahaan berjalan secara efisien dan efektif, mendapatkan simpati, dukungan, dan kepercayaan dari para stakeholder.

Penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN diatur dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. KEP-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus Tahun. 2002 Pada BAB 1 (Ketentuan Umum) disebutkan bahwa:

“*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang di gunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”

Good Corporate Governance menjadi penting mengingat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha, para pelaku bisnis dihadapkan pada berbagai macam kendala dan tantangan yang semakin beragam

baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang di kenal sebagai Cadbury Report, isu *Good Corporate Governance* banyak membahas perlunya pemisahan antara pemegang saham (pemilik) dan direksi (pengelola) perusahaan, konsep ini di dasarkan pada teori keagenan (*agency theory*) yang di kembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. (Sumber ; Marisi P. Purba, S.E., AK, M.H. Profesi Akuntan Publik di Indonesia, 2012: 19)

Di Indonesia, *Good Corporate Governance* menjadi isu Nasional pada tahun 2000 atau pada saat perekonomian Indonesia baru pulih dari krisis. Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998.

Dalam rangka *Economy Recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini di harapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disingkat dengan PT. INTI (Persero) resmi berdiri pada tanggal 30 Desember tahun 1974.

Pada 2017 adalah periode titik balik PT INTI (Persero). Perusahaan menjalankan Turnaround Strategy: Survival Through Productivity, yang bermakna perusahaan berusaha untuk mempertahankan kondisi bisnis perusahaan melalui prioritas peningkatan produktivitas di segala bidang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan labaan Perusahaan.

Untuk mewujudkan target tahun 2017, perusahaan menjalankan sejumlah strategi bisnis melalui pengembangan bisnis baru (*New Revenue Stream*) dan model bisnis baru, terutama di bidang *Digital Business*, peningkatan kontribusi *Revenue* dari *Recurring Business*, serta peningkatan kontrak dengan *Contribution Margin* yang lebih baik. Untuk mendukung strategi tersebut, PT INTI (Persero) pun melakukan pengembangan model pendanaan baru, di antaranya melalui kemitraan, untuk mengembangkan *New Revenue Stream*. Lalu, revitalisasi manufaktur dengan model investasi baru, serta sinergi BUMN untuk meningkatkan *Value Creation*. Hal ini dibarengi pula dengan pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada manajemen proyek dan *Engineering*.

Sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate*

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan *Assessment* dan/atau evaluasi penerapan GCG untuk mendapat kesimpulan mengenai kondisi penerapan GCG pada Perusahaan. Maka dari itu PT. INTI secara rutin dan berkesinambungan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi praktek *Good Corporate Corporate Governance* untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan standar pencapaian praktek *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance saat ini bukan lagi hanya merupakan sebuah sistem atau seperangkat aturan, namun sudah merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Proses implementasi *Good Corporate Governance* PT. INTI dilaksanakan secara sistematis melalui *Road Map Good Corporate Governance* PT. INTI yaitu tahap pembangunan seperangkat *Good Corporate Governance* yang dimulai dengan membentuk komite tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk membangun dasar penerapan *Good Corporate Governance* pada tahun 2004.

Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan perusahaan yang telah menerapkan *e-auction* guna transparansi pengadaan barang dan jasa, memberdayakan website resmi untuk keterbukaan informasi, publikasi laporan keuangan, dan melakukan perbaikan dalam berbagai peraturan.

Berikut adalah pencapaian skor masing-masing aspek *governance* PT INTI (Persero) dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 1.1
Capaian Skor Masing-masing Aspek Governance
Tahun 2014-2015

No.	Aspek Governance	Bobot	2014		2015	
			Capaian	Presentase	Capaian	Presentase
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,18	88,22	6,44	91,94
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,06	89,50	7,79	86,54
III	Dewan Komisaris	35	26,92	76,93	30,31	86,03
IV	Direksi	35	31,42	89,77	30,64	87,55
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	5,97	66,37	7,05	78,28
VI	Aspek Lainnya	5	0		0	
	Total	100	78,55		82,02	

Sumber : *Annual Report* PT. INTI Tahun 2014-2015

Tabel 1.2
Capaian Skor Masing-masing Aspek Governance
Tahun 2016-2017

No	Aspek Governance	Bobot	2016		2017	
			Capaian	Persentase	Capaian	Presentase
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,20	88,59	6,2	88,7
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,11	90,16	7,9	88,5
III	Dewan Komisaris	35	30,93	88,36	30,2	86,4
IV	Direksi	35	31,75	90,72	30,5	87,3
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7,1	78,84	6,6	73,8
VI	Aspek Lainnya	5	0		0	
	Total	100	84,09		81,63	

Sumber : *Annual Report* PT. INTI Tahun 2016-2017

Jika dilihat dari total skor tingkat pencapaian aspek *Governance* diatas cenderung mengalami kenaikan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun terjadi penurunan kembali di tahun 2017. Jika di lihat dari masing-masing skor setiap aspek pertahunnya selalu terjadi fluktuasi nilai yang menggambarkan kurangnya konsistensi dalam implementasi *Good Corporate Governance* sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Akan tetapi meskipun skor tingkat pencapaian *Good Corporate Governance* PT. INTI (Persero) berada pada kategori baik, terdapat masalah terkait tinjauan keuangan yakni tidak tercapainya target atau sasaran yang telah di rencanakan oleh PT. INTI. Dengan tidak tercapainya target penjualan, maka *Contribution Margin* secara keseluruhan yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi beban tetap dan beban bunga. Laba kotor proyek di luar proyek TITO sebesar Rp57,39 miliar (termasuk dari proyek PLTS), namun laba kotor tersebut tidak dapat menutupi rugi kotor proyek TITO akibat membengkaknya biaya operasional yang disebabkan oleh bertambahnya durasi penyelesaian pekerjaan dan adanya beban proyek yang telah dikeluarkan sebelum pengurangan volume pekerjaan.

Setelah kembali membukukan keuntungan di tahun 2015 sebesar Rp. 482,32 miliar yang sebagian besar dikontribusikan oleh revaluasi aset tetap, kinerja Perusahaan kembali menurun di tahun 2016. Pendapatan tahun 2016 hanya tercapai Rp 681,07 milyar atau 68,1% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 sebesar Rp 1,00 triliun.

Sepanjang perjalanan tujuh tahun sejak 2011, pekerjaan modernisasi jaringan akses dengan pola *trade-in tradeoff* atau dikenal sebagai Proyek TITO, dengan PT Telkom (Persero) sebagai pemberi kerja, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap portofolio pendapatan perusahaan. Namun, pola pembiayaan proyek ini menjadi

kurang menarik mengingat perlunya pendanaan dari perusahaan atau pihak ketiga yang cukup besar. Pelaksanaan proyek TITO yang telah memasuki tahun ketujuh perlu segera dituntaskan dan diperluas ke arah bisnis Instalasi Kabel Rumah (IKR), *Fiber to the Home* (FTTH), dan *Maintenance* dengan pola pendanaan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, pada 24 Februari 2017, proyek TITO resmi ditutup.

Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan di tahun 2017 memperoleh skor "60,0" dan diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kategori tingkat kesehatan Kurang Sehat "BBB".

Dari data tersebut di atas jelas perusahaan belum mampu mencapai target dan tujuannya jika di lihat dari tinjauan keuangan, jika masalah tersebut belum teratasi di tahun 2018 akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka dari itu perusahaan harus terus memperbaiki tata kelola perusahaannya dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk implementasi *Good Corporate Governance*.

Terkait data tinjauan keuangan sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yakni di perusahaan terdapat isu-isu terkait judul yang dibawakan penulis.

Isu pertama adalah dimana karyawan PT. INTI telat memberikan gaji kepada karyawannya. Karyawan INTI menuntut pembayaran gaji Juni

yang belum turun hingga awal Juli 2015. Sumber: <http://daerah.sindonews.com>.

Isu kedua menurut berita yang dimuat di www.kontan.com *Marketing and Distribution* Pertamina menyampaikan situasi bahwa PT.INTI sedang mengalami krisis kepercayaan dari para penyedia pinjaman dari perbankan, sebab mereka tahu PT. INTI sedang mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang penulis dapatkan di *Annual Repport* PT.INTI (Persero) tahun 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan sempat mengalami kerugian selama empat tahun terakhir.

Hal tersebut mencerminkan kurangnya pengawasan dan penerapan *Good Corporate Governance* yang belum terlaksana dengan maksimal, dimana belum terbentuk suatu pengawasan internal yang baik.

Padahal sudah jelas bahwa auditor internal adalah sebagai bagian intern perusahaan yang harus memainkan peranan penting dalam mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, sesuai dengan peran Auditor Internal selaku akuntan perusahaan sebagai pembantu direksi dan dewan komisaris.

Susilo dan Simarmata (2007:17) menyatakan bahwa GCG merupakan seperangkat tata hubungan antara Manajemen Perseroan, Direksi, Komisaris, Pemegang saham dan Para pemangku kepentingan lainnya. GCG dapat disimpulkan sebagai tata kelola perusahaan yang

menjelaskan relasi antara berbagai partisipasi dalam perusahaan untuk menentukan arah dari perusahaan tersebut kedepannya.

Menurut Tjager dkk (2003) dalam Sela (2012) mengemukakan bahwa salah satu unsur pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah Audit Internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana perusahaan.

Keberadaan atau pembentukan Audit Internal pada perusahaan swasta maupun BUMN diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 1983 Pasal 46 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum, dan Persero yang menyatakan bahwa:

1. Satuan pengawasan intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka manajemen suatu perusahaan dituntut untuk mengembangkan audit internal agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kinerja di perusahaan.
2. Pimpinan BUMN dan BUMD menggunakan pendapat dan saran dari satuan pengawasan intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Audit internal merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh direksi. Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha atau adanya kondisi *economic turbulence*, dimana terjadi perubahan secara dinamis dan tidak dapat di prediksi sehubungan dengan era globalisasi,

sehingga sumber informasi yang sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak teramati secara tidak langsung (Hery, 2018:1).

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, karena jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. INTI PERSERO)”**.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Auditor internal selaku akuntan perusahaan khususnya di PT. INTI belum mampu menciptakan peranan yang baik untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*.
2. PT. INTI belum maksimal dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.
3. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI belum terealisasi dengan baik.
4. Auditor internal sebagai bagian yang sangat berperan dalam menciptakan *Good Corporate Governance* belum berperan secara efektif.
5. Implementasi penerapan *Good Corporate Governane* INTI belum mencapai 100% ini terbukti dari masih terdapat isu-isu terkait tata kelola perusahaan.
6. Adanya kesenjangan antara Karyawan dan Dewan Direksi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada Audit Internal

beserta pengaruhnya terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI (Persero).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Audit Internal pada PT. INTI (Persero).
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI (Persero).
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI (Persero).

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini di maksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* , adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Audit Internal yang di laksanakan di PT. INTI (Persero).
2. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI (Persero).
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI (Persero).

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan pengaruh penerapan Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* serta literatur-literatur lainnya dalam keadaan sesungguhnya yang ada diperusahaan. Selain itu, penulis juga mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

- a. Ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu dan teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman tentang pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

b. Sebagai suatu sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu terkini dalam pengembangan akuntansi itu sendiri.

c. Untuk memenuhi salah satu tugas syarat dalam menempuh ujian untuk memilih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan mengenai pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu lulusannya serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.